

Dinamika Kebijakan Penerapan Penyuluhan Perikanan: Kasus Kota Probolinggo Tahun 2009-2024

[Dynamics of Fisheries Extension Policy Implementation:
The Case of Probolinggo City In 2009-2024]

Yoga Yonut Favendri, Andin H Taryoto, Rina Astarika

Sekolah Pascasarjana, Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437

Diterima: 10 Januari 2025

Abstrak

Penyuluhan perikanan sebagai instrumen penting peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku utama, penyuluhan akan efektif jika didukung kebijakan selaras dari pusat hingga daerah yang sesuai amanah UU No. 16 Tahun 2006. Upaya tersebut akan menimbulkan pertanyaan akan dinamika kebijakan pemerintah daerah khususnya Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Historis Komparatif, mencakup kebijakan penyuluhan perikanan dalam aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pada periode (2009-2024). Selama tiga periode pemerintahan, terdapat tiga kelembagaan penyuluhan yang berbeda dan perubahan dalam ketenagaan penyuluh. Kegiatan penyuluhan dimulai dengan pembuatan program dan rencana kegiatan, menggunakan metode yang sesuai dengan pelaku utama perikanan. Sarana dan prasarana penyuluhan disediakan sejak 2009, meski hanya sebagian yang digunakan. Pendanaan berasal dari APBD dan APBN untuk kegiatan penyuluhan dan operasional, sedangkan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diperlukan sinergi kebijakan penyuluhan perikanan dari pusat hingga daerah, sehingga dapat membuat pelayanan terhadap masyarakat perikanan dapat terlayani dengan baik.

Kata kunci: kebijakan; penyuluhan perikanan; pemerintah daerah

Abstract

Fisheries extension as an important instrument to increase the capacity and productivity of key actors, extension will be effective if supported by aligned policies from the central to regional levels in accordance with the mandate of Law No. 16 of 2006. This effort will raise questions about the dynamics of local government policies, especially in Probolinggo City. This study uses a Qualitative Historical Comparative method, covering fisheries extension policies in the aspects of institutions, personnel, implementation, infrastructure, funding, as well as guidance and supervision in the period (2009-2024). During the three government periods, there were three different extension institutions and changes in extension personnel. Extension activities began with the creation of programs and activity plans, using methods appropriate to the main fisheries actors. Extension facilities and infrastructure were provided since 2009, although only a portion was used. Funding comes from the Regional Budget (APBD) and the National Budget (APBN) for extension and operational activities, while guidance and supervision were carried out by relevant government agencies in Probolinggo City, East Java Province, and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Synergy in fisheries extension policies from the central government to the regional governments is needed to ensure effective service delivery to the fishing community.

Keywords: policy; fisheries extension; regional government

Penulis Korespondensi

Yoga Yonut Favendri | yogayonut87@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan perikanan ke depan, salah satunya akan dipengaruhi oleh keberadaan kelembagaan penyuluhan. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang otonomi Pemerintahan Daerah dan akan mempengaruhi implementasi Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) terkait tentang penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan Perikanan menurut Permen PAN & RB nomor 18 tahun 2022 adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh perikanan bekerja sehari-hari di lapangan, tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, bertemu dengan pelaku utama dan pelaku usaha KP, (Sudrajat, 2021).

Dalam visi presiden yang tercantum dalam Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

2020-2024, terdapat misi yang menyatakan perlunya sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terutama yang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan produksi. Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan tertera dalam Undang – Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan, menyampaikan perihal penyuluhan secara umum baik perikanan, pertanian serta kehutanan. Dalam undang-undang tersebut dibahas semua kebijakan serta tugas dan fungsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimulai dari kelembagaan, ketenagaan penyuluh, penyelenggaraan penyuluh, sarana dan prasarana, pembiayaan penyuluhan serta pembinaan dan pengawasan nomor 16 tahun 2006 merupakan komponen yang mendukung kegiatan penyuluhan. Dengan kaitannya tersebut pemerintah daerah dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang diamanahkan sehingga dapat berkelanjutan secara program dan kegiatan. Dalam tulisan ini, penulis menganalisis kebijakan pemerintah daerah terkait penyuluhan perikanan dalam kurun waktu 2009-2024 (3 periode masa jabatan) yang dijabat oleh Walikota

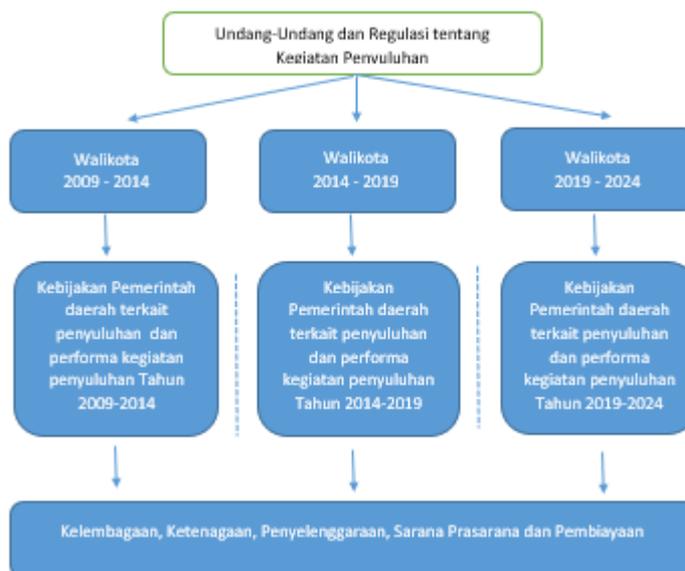
Probolinggo yang berbeda-beda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dinamika bentuk-bentuk kelembagaan, mengetahui perkembangan ketersediaan tenaga penyuluh perikanan, mengetahui dinamika kegiatan penyuluhan sebagai bentuk dari penyelenggaraan penyuluhan, menginventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk penyuluhan, menganalisis sistem pembiayaan penyuluhan perikanan dan mengidentifikasi sistem pembinaan dan pengawasan penyuluhan perikanan, sehingga dalam pemerintahan selanjutnya tercipta kebijakan yang sesuai dengan amanah undang-undang. Dengan tujuan tersebut diperlukan kerangka berpikir (Gambar 1)

Dari kerangka pemikiran diatas, dimungkinkan terdapat perbedaan kebijakan yang dibuat oleh kepala

daerah pada setiap periode pemerintahan.

BAHAN DAN METODE

Lokasi yang diambil peneliti untuk penelitian ini adalah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2024 sampai dengan September 2024. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi sedangkan, penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif Historis Komparatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Hal ini sesuai dengan pendapat McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas



Gambar 1. Kerangka Berpikir

atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Menurut Abdussamad (2021), penelitian kualitatif memiliki tahapan-tahapan secara garis besar (1) Tahap Orientasi; (2) Tahap Eksplorasi (3) tahap "**member check**"; responden, informan, maupun narasumber. Sedangkan penelitian historis menurut Sukardi (2021), merupakan penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis, berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Menurut Achmadi dan Narbuko (2015) Penelitian historis bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan terbuka, melalui pengumpulan, pengevaluasian, dan verifikasi data, serta menyusun secara sistematis. Sedangkan Analisis komparatif menurut Goodrick (2014), dalam penelitian menyatakan acuan (1) menemukan kesamaan dan perbedaan dari aspek-aspek yang akan dibandingkan; (2) mengembangkan interpretasi serta implikasi dari kesamaan maupun

perbedaan yang ditemukan, sehingga dapat tersusun program-program konkret di lapangan; dan (3) penjelasan terhadap kondisi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kesamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam kajian. Dalam penelitian tersebut historis komparatif menurut Karyanta, Suryanto dan Hendriani (2020) menyatakan bahwa tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam (1) melakukan Konseptualisasi topik dan kondisi penelitian; (2) memetakan bukti; (3) mengevaluasi kualitas bukti; (4) Mengorganisasi bukti; (5) melakukan sintesis; dan (6) menuliskan laporan Instrumen penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan: (1) Wawancara kepada narasumber; (2) Dengan alat bantu kuesioner; dan (3) dukungan data primer dan sekunder.

Metode kualitatif mencakup kegiatan penyusunan teori, pengumpulan data, mengelompokkan serta memilah data, yang selanjutnya dianalisis dan dilakukan pemeriksaan silang sehingga didapatkan sebuah kesimpulan (Supriatna, Denok dan Rita, 2022). Data dan informasi yang terkumpul dari tahap pengumpulan data dan informasi dipilah, dipilih, serta dikelompokkan sesuai dengan subyek fokus penelitian. data dan informasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk tabulasi, maupun dalam format narasi tulisan. Pengelompokan

data dan informasi terutama mengacu kepada periodisasi masa kepemimpinan Walikota Probolinggo dalam kurun waktu tahun 2009 – 2024. Data dan informasi yang diperoleh kemudian analisis komparasi, dikelompokkan atas periode kepemimpinan Walikota, terutama sesuai dengan lima aspek utama Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan (Kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Ketenagaan Penyuluhan Perikanan, Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan, Sarana Penunjang Penyuluhan Perikanan, dan Pembiayaan Penyuluhan Perikanan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kelembagaan Penyuluhan Perikanan

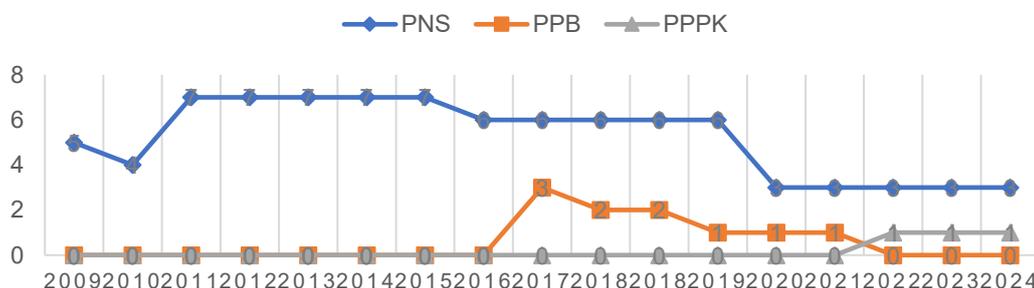
Terdapat 3 kelembagaan penyuluhan perikanan di Kota Probolinggo: (1) Penyuluh Perikanan ASN (PNS, PPPK, PPB); (2) Penyuluh Perikanan Swadaya; dan (3) Kelompok perikanan (Pokdakan, Poklahsar, KUB dan Pokmaswas). Keragaan Penyuluh ASN di Kota Probolinggo disajikan dalam Tabel 1.

Ketenagaan Penyuluhan Perikanan

Selain perubahan tersebut, terjadi juga dinamika perubahan jumlah penyuluh (ASN, Swadaya dan kelompok perikanan) yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Kelembagaan Penyuluh

Jenis Penyuluh	2009-2014					2014-2019					2019-2024					
	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PNS	Pemerintah daerah										KKP					
PPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KKP	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KKP



Gambar 1. Jumlah Penyuluh

Keterangan:

PNS : Pegawai Negeri Sipil

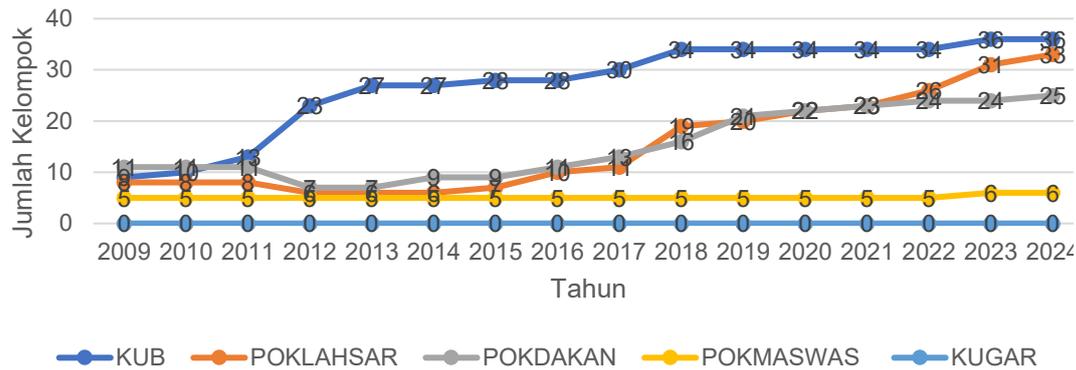
PPB : Penyuluh Perikanan Bantu

PPPK : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Tabel 2. Jumlah Penyuluh Swadaya

Bidang Usaha	2009-2014					2014-2019					2019-2024					
	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Budidaya	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pengolah	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nelayan	-	-	-	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
Jumlah	-	-	-	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10

Grafik 2. Jumlah Kelompok Pelaku Utama



Penyelenggaraan/kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dimulai dengan perencanaan kegiatan penyuluhan, dalam hal ini perencanaan penyuluhan dimulai dengan penyusunan program penyuluhan dan juga penyusunan rencana kerja penyuluhan.

Tabel 3 menjelaskan program penyuluhan perikanan tingkat kabupaten kota dilakukan sampai saat ini, namun sampai dengan tahun 2018 program

penyuluhan perikanan dibuat dengan kegiatan *bottom up*. Sedangkan dari tahun 2019, program tingkat penyuluhan perikanan kabupaten/kota dibuat dengan dasar turunan dari Program Penyuluhan Perikanan Nasional (*top down*) yang langsung diturunkan menjadi rencana kerja penyuluhan.

Tabel 3. Program dan Rencana Kerja Penyuluhan

Jenis Kegiatan	2009-2014					2014-2019					2019-2024					
	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Programa Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
Rencana Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Tabel 4. Metode Penyuluhan yang Diterangkan

Metode	2009-2014						2014-2019						2019-2024					
	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Penyuluhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Sosialisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Anjongsana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Diskusi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Sekolah Lapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√		
Demonstrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Study Banding	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	-	√		
Pameran	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Siaran Radio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-		
Media Tercetak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Media Audio- Visual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-		

Materi penyuluhan merupakan bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan (Permen KP 30/2014).

Sarana dan prasarana penyuluhan

Sarana berarti memiliki makna peralatan yang digunakan yang dapat mencapai kegiatan penyuluhan. Contoh peralatan yang digunakan dalam penyuluhan perikanan adalah ATK, media penyuluhan, peralatan praktik kegiatan (budidaya, tangkap dan pengolahan), kendaraan dll. Peralatan memiliki peran yang penting sebagai penghubung kegiatan penyuluhan perikanan.

Prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dalam kegiatan penyuluhan perikanan prasarana yang dibutuhkan adalah balai-balai penyuluhan di mana itu berfungsi untuk bertemunya penyuluh dan pelaku utama. Selain untuk wadah/tempat bertemunya penyuluh dengan pelaku utama fungsi lainnya adalah untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan (sosialisasi, diskusi, dan lain-lain) dan juga sebagai kantor penyuluh.

Tabel 5. Pengadaan Sarana Penyuluhan berdasarkan tahun Perolehan

Sarana Penyuluhan	2009-2014					2014-2019					2019-2024					
	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meja	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kursi	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemari	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamera	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepeda motor	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laptop	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ph pen	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termometer	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refrakto meter	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Televisi	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lcd proyektor	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Printer	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
Buku	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handycam	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompore	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabung gas	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kipas angin	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin pemotong rumput	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Sound	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 6. Prasarana Penyuluhan Berdasarkan tahun Perolehan

Prasarana Penyuluhan	2009-2014					2014-2019					2019-2024					
	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pos Penyuluh	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolam Ikan	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7. Prasarana Penyuluhan Perikanan (tahun 2024)

No	Prasarana Penyuluhan	Jumlah	Kondisi	Pemakai	Sumber Dana
1	Pos Penyuluh	3	KB	Penyuluh dan Bid Budidaya	DAK
2	Kolam Ikan	3	RB	Bid Budidaya	APBD

Keterangan:

KB : Kurang Baik

RB : Rusak Berat

APBD : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus

Pembiayaan Penyuluhan

Penyuluh perikanan pada saat masih menjadi pegawai pemerintah daerah bersumber dari APBD diberikan

biaya operasional penyuluhan (BOP) berupa biaya bahan bakar minyak (BBM) apabila memegang kendaraan dinas (sepeda motor penyuluhan) dan biaya listrik pos penyuluh. untuk operasional

listrik untuk pos penyuluh, diberikan tiap bulan sesuai dengan anggaran. Hal berbeda ketika kepegawaian penyuluh perikanan berpindah ke KKP, Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) diberikan setiap bulan yang disalurkan melalui Satminkal (Satuan Administrasi Pangkalan) yang bersumber dari APBN.

Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan

Pembinaan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, utamanya di Kota Probolinggo berupa pembinaan kepegawaian secara umum yang diadakan oleh Dinas terkait yang menaungi ataupun dari Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi (KKP dan dinas provinsi)..

Gambaran keseluruhan dari Kinerja Penyuluhan Perikanan di Probolinggo dalam 3 periode kepemimpinan Walikota, dalam tabel 9 disajikan perbandingan Kinerja Penyuluhan Perikanan pada masing-masing periode Kepemimpinan Walikota. Tampak bahwa terdapat perbedaan yang nyata terlebih pada ketenagaan penyuluh ASN, kemudian penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, serta pembiayaan-pembiayaan kegiatan penyuluhan. Aspek-aspek yang dibandingkan sesuai dengan UU 16/2006 tentang aspek utama dalam penyelenggaraan penyuluhan. Selain UU 16/2006 terdapat pula UU yang mempengaruhi aspek tersebut yakni UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang membagi urusan pusat, provinsi dan kab/kota.

Tabel 8. Anggaran pada dinas yang membidangi kelautan dan perikanan

No	LKPJ	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Program (jumlah)	Kegiatan (jumlah)
1	2009	7.911.396.170,84	7.423.899.881	14	45
2	2010	13.627.616.609	12.888.820.976	17	41
3	2011	5.601.403.211	5.496.782.701	31	62
4	2012	9.397.448.804	9.210.531.368	20	78
5	2013	9.384.036.312	9.343.665.223	11	-
6	2014	12.218.693.129	11.605.739.471	13	-
7	2015	10.143.454.211	8.932.998.407	12	-
8	2016	11.143.532.817	10.464.478.278	18	70
9	2017	10.044.925.867	9.401.540.398	13	48
10	2018	9.347.712.063	8.764.532.243	15	67
11	2019	8.312.497.206	7.591.975.804	13	48
12	2020	16.806.490.892,50	16.288.808.851	-	41
13	2021	17.233.481.021	16.237.203.438	12	48
14	2022	15.443.453.004	14.874.645.845	12	37
15	2023	22.170.558.245	20.332.162.261	13	39

Tabel 9. Komparasi kebijakan Penyuluhan Perikanan

NO.	ASPEK	PERIODE 2009-2014	PERIODE 2014-2019	PERIODE 2019-2024
1.	<u>Kelembagaan</u>	a. Penyuluh perikanan PNS Pemda b. Penyuluh swadaya c. Kelompok pelaku utama	a. Penyuluh perikanan PNS Pemda b. Penyuluh Perikanan Bantu KKP c. Penyuluh swadaya d. Kelompok pelaku utama	a. Penyuluh perikanan PNS KKP b. Penyuluh Perikanan PPPK KKP c. Penyuluh swadaya d. Kelompok pelaku utama
2.	<u>Ketenagaan</u>	a. Jumlah akhir Penyuluh perikanan PNS = 7 orang b. Penyuluh swadaya = 10 orang	a. Jumlah akhir Penyuluh perikanan PNS = 6 orang b. Penyuluh Perikanan Bantu = 1 orang c. Penyuluh swadaya = 10 orang	a. Jumlah akhir Penyuluh perikanan = 3 orang b. Penyuluh Perikanan PPPK = 1 ora c. Penyuluh swadaya = 10 orang
3.	<u>Penyelenggaraan</u>	a. program perikanan kota b. rencana kerja penyuluhan c. kegiatan-kegiatan dinas	a. program perikanan kota b. rencana kerja penyuluhan c. kegiatan-kegiatan dinas	a. rencana kerja penyuluhan b. kegiatan-kegiatan dinas
4.	<u>Sarana dan prasarana</u>	a. pembangunan pos penyuluh (2011, 2013) b. pembelian sarana (2009,2013)	a. pembangunan pos penyuluh (2014) b. pembelian sarana (2014,2015)	a. <u>tidak ada</u> b. <u>tidak ada</u>
5.	<u>Pembiayaan</u>	a. Kegiatan penyuluhan (APBD) b. Sarana dan Prasarana (APBD dan DAK) c. <u>Operasional BBM kendaraan dinas (APBD)</u> d. Operasional Listrik Pos Penyuluh (APBD)	a. Kegiatan penyuluhan (APBD) b. Sarana dan Prasarana (APBD dan DAK) c. <u>Operasional BBM kendaraan dinas (APBD)</u> d. Operasional Listrik Pos Penyuluh (APBD)	a. Kegiatan penyuluhan (APBD) b. <u>Operasional BBM kendaraan dina (APBN)</u> c. Operasional Listrik Pos Penyuluh (APBD)
6.	<u>Pembinaan dan Pengawasan</u>	a. BKD b. Dinas Perikanan Kota c. Dinas Perikanan Prov d. KKP	a. BKD b. Dinas Perikanan Kota c. Dinas Perikanan Prov d. KKP	a. Dinas Perikanan Kota b. KKP

Pembahasan

Dalam 3 periode pemerintahan Walikota Probolinggo, 3 kelembagaan penyuluhan tetap sama. Perbedaannya terkait dengan status Penyuluh Perikanan PNS yang statusnya berubah dari pegawai daerah menjadi pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan PPB/PPPK statusnya tetap karena merupakan pegawai KKP. Perubahan jumlah penyuluh pada tahun 2012-2018 yang bertambah atau berkurang tergantung dengan beban kerja penyuluh dan juga cakupan wilayah kerja penyuluhan (Permen KP 44/2023). Hal ini dalam pandangan Pramono (2020), terkait dengan hakikat dari Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), yang menunjuk pada adanya perhitungan untung-rugi maupun pertimbangan kemanfaatan suatu kebijakan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Prianggoro, Halim, dan Syukur 2022, menyarankan perlunya redesain dan penguatan kelembagaan penyuluh perikanan, dengan membentuk stasiun penyuluhan perikanan tiap provinsi

Kegiatan penyuluhan perikanan tidak lepas dari asal kata penyuluhan yang berarti proses pembelajaran, sehingga penyuluhan perikanan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Permen KP 30/2014).

Dengan dasar tersebut penyuluh perikanan dituntut untuk selalu belajar untuk mendampingi pelaku utama perikanan, hal ini sesuai dengan pendapat dari Ratnadila, Taryoto & Leilani (2019) yang menyampaikan bahwa proses pembelajaran sangat penting bagi penyuluhan perikanan yang nantinya akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pelaku utama. Program Perikanan dan Rencana Kerja Penyuluhan merupakan jalur/arah untuk menentukan kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya sesuai dengan Permen KP 13/2011. Program penyuluhan perikanan tingkat kota terhenti sampai tahun 2020, karena digantikan dengan program penyuluhan langsung dari pusat. Hal demikian tidak terjadi pada rencana kerja penyuluhan tahunan yang disusun setiap tahun atas dasar program penyuluhan. Dalam pandangan Pramono (2020) maupun Riener (2019), hal ini terkait dengan keberadaan Teori "*Top-down Approach*" yang menghendaki terpenuhinya misi pihak pusat ataupun atasan, dengan dukungan kegiatan dari pihak daerah atau bawahan. Model penyuluhan untuk memberikan materi kepada masyarakat berbentuk partisipatif sesuai dengan kebutuhan pelaku utama sehingga mudah dipahami, hal tersebut senada dengan pendapat dari Rosiah, Poernomo

dan Hasan (2018) yang menyatakan bahwa model penyuluhan partisipatif diperlukan dengan mengajak masyarakat untuk saling membagi pengetahuannya, untuk memperoleh saling pengertian, dan bekerja sama untuk merencanakan aksi. Pendapat yang sama juga disampaikan Baiduri dan Munzir (2022) motivasi belajar tidak hanya berasal dari penyuluh, namun motivasi sesama pelaku usaha.

Sarana dan prasarana penyuluhan sampai saat ini pada tahun 2024, merupakan aset dari pemerintah kota Probolinggo yang pengelolaannya berada pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo. Dengan demikian, penyuluh perikanan di Kota Probolinggo menggunakan sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan ijin pemanfaatan dari Kepala Dinas. Sarana dan prasarana yang dipakai saat ini berupa bangunan pos penyuluh dan juga beberapa peralatan kantor (meja, kursi dan lemari), sedangkan peralatan untuk media penyuluhan kondisinya sudah kurang baik/rusak. Dinilai bahwa hal ini berkaitan dengan hakikat dari Teori Model Rasional Komprehensif, yang menekankan pentingnya faktor Rasionalitas, yaitu perimbangan antara keluaran dan hasil yang akan diperoleh dari kegiatan maupun kebijakan yang ditetapkan (Muadi, Ismail MH, dan Sofwan, 2016). Karena

fasilitas penyuluhan perikanan telah menjadi tanggung jawab pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan, maka penggunaan sarana prasarana yang ada harus seizin dari pihak Dinas tersebut. Meskipun demikian penggunaan peralatan penyuluhan sebagai media praktik dapat meningkatkan minat belajar pelaku usaha (Sugiharto, Purnamasari dan Rini, 2019)

Untuk biaya operasional penyuluhan diberikan kepada penyuluh yang memegang kendaraan dinas pada tahun 2013-2017. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai saat ini, biaya operasional penyuluh diberikan ke setiap penyuluh karena kepegawaian menjadi pegawai KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sementara itu, Pembinaan dan pengawasan penyuluhan perikanan dilakukan oleh dinas terkait, dinas yang membidangi antara lain Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perikanan Kota Probolinggo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Periode tahun 2009-2017, pembinaan dan pengawasan dilakukan dinas terkait yang disebutkan sebelumnya. Namun di periode tahun 2018-2024, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Probolinggo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikarenakan UU 23/2014 terkait kepegawaian dan penugasan penyuluh

perikanan. Teori Allison (Iswahyudi, 2021) tepat digunakan sebagai pendekatan dari perkembangan keadaan tersebut. Teori Allison menyebutkan bahwa perubahan kebijakan berkaitan dengan adanya tiga faktor utama: Rasionalitas Aktor, Proses Organisasional, dan Politik Birokrasi. Karena Penyuluhan Perikanan sudah menjadi tanggung jawab KKP, maka KKP harus bertanggungjawab terhadap segala aspek yang terkait dengan kegiatan penyuluhan perikanan; hal ini secara nyata terkait dengan faktor Rasionalitas Aktor dan juga Proses Organisasional. Dalam hal Politik Birokrasi, meskipun penanggung jawab kegiatan penyuluhan perikanan adalah KKP, namun demikian pihak KKP sebagai instansi pusat, masih memiliki kewenangan untuk meminta campur tangan dari pihak Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk kegiatan bersama, maupun dalam bentuk-bentuk lain yang terkait dengan alokasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan.

Secara keseluruhan, penelitian ini banyak didasarkan pada penerapan Teori Perumusan Kebijakan Publik dalam aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan (Ramdhani, 2017; Muadi, 2016). Dalam teori ini, alasan dan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan publik menjadi

salah satu pokok perhatian utama. Aspek berikutnya yang dinilai perlu diperhatikan adalah siapa saja aktor-aktor yang seyogyanya terlibat dalam proses penyusunan perumusan kebijakan tersebut. Aspek ketiga yang perlu juga diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang terlibat di dalam proses penyusunan kebijakan publik tersebut. Kegiatan penyuluhan perikanan di kota Probolinggo memiliki dasar kegiatan utama yang bersumber dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada masing-masing periode Walikota. Aktor ataupun pelaku kegiatan yang terlibat meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Walikota, Dinas terkait, serta para Penyuluh Perikanan sendiri. Tentu saja sejumlah pihak juga terlibat di dalamnya secara tidak langsung. Selanjutnya, faktor kepemimpinan menjadi salah satu fokus perhatian utama juga, terutama terkait dengan apa dan bagaimana Para Walikota pada masing-masing periode melaksanakan dan memberikan arahan kegiatan kepada pihak-pihak pelaksana kegiatan di tingkat lapangan. Dinamika kebijakan dalam masing-masing periode dapat menghasilkan kebijakan baru, perubahan dan juga efektivitas sehingga ke depan dalam periode pemerintahan Walikota yang baru lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini

- 1) Kelembagaan penyuluhan pada 3 periode Walikota Probolinggo tidak mengalami perubahan, yang terdiri dari penyuluh perikanan ASN (Aparatur Sipil Negara), penyuluh swadaya dan kelompok masyarakat.
- 2) Ketenagaan penyuluhan perikanan mengalami dinamika pada periode tersebut, terjadi perbedaan jumlah penyuluh perikanan terutama pada penyuluh perikanan ASN (Aparatur Sipil Negara).
- 3) Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pada periode 2009-2024 tidak berubah nyata, karena untuk perencanaan kegiatan penyuluhan masih berdasarkan program dan rencana kerja tahunan penyuluh perikanan
- 4) Terdapat perbedaan yang cukup nyata terkait dengan sarana dan prasarana penyuluhan pada tiap periode Walikota .
- 5) Pendanaan yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan di tiap periode berasal dari APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara).
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluh Pemerintah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saran yang dapat diberikan

- 1) Koordinasi dengan dinas terkait untuk kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan demi terciptanya penyesuaian kebutuhan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat perikanan.
- 2) Penyesuaian program-program dinas yang membidangi perikanan berupa rencana kegiatan maupun kegiatan dinas untuk penyesuaian kegiatan dengan program dan rencana kerja penyuluhan sehingga masyarakat pelaku utama perikanan terlayani secara optimal.
- 3) Diperlukan adanya sinergi pemberian peminjaman serta pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dari dinas perikanan untuk digunakan untuk kegiatan penyuluhan.
- 4) Perlu dikembangkan sinergi pendanaan dalam rangka operasional kegiatan penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan penyuluhan.
- 5) Diperlukan pemahaman-pemahaman terkait kegiatan penyuluhan perikanan oleh pihak-pihak terkait, sehingga tidak membebankan kegiatan dinas kepada penyuluh perikanan

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Syakir Media Press

Achmadi, A., dan Narbuko. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara

Baiduri, I., & Munzir, A. 2022. "Peran Penyuluhan Dalam Pengembangan Perikanan Budidaya Di Kecamatan Kuranji Kota Padang". Article of Undergraduate Research, Faculty of Fisheries and Marine Science, Bung Hatta University 21(1) : 2-2.

BPS. 2021. *Kota Probolinggo Dalam Angka 2021*. Probolinggo : CV Azka Pratama

Goodrick, D. 2014. "Comparative Case Studies, *Methodological Briefs: Impact Evaluation 9*", No. innpub754.

Iswahyudi, Fajar. 2021. "Perubahan Kebijakan Pasca Sukses Kepemimpinan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Banjir di DKI Jakarta Tahun 2017-2020". Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

Karyanta, N. A., Suryanto, S., & Hendriani, W. 2020. "Menggunakan metode historis komparatif dalam penelitian psikologi". *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 145-156.

- Mccusker, K., & Gunaydin, S. 2015. "Research Using Qualitative", Quantitative Or Mixed Methods And Choice Based On The Research *Perfusion* 30(7) : 537-542.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani. 2016. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Review Politik* Volume 06, No 02, Desember 2016.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* : Unisri Press. Surakarta.
- Prianggoro, B. A., Halim, H., & Syukur, A. T. 2022. "Institutional Structuring of Fisheries Extension and Its Impact on Personnel Administration in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries". *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 10(2), 48-57
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11(1) : 1-12.
- Ratnadila, N. S., Taryoto, A. H., & Leilani, A. 2019. "Pemanfaatan Media Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan (Kasus Penyuluh Perikanan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali)". *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 13(2) : 189-204.
- Riener, Cedar. 2019. "New Approaches and Debates on Top-Down Perceptual Processing : Teaching of Psychology". 46. 267-272. 10.1177/0098628319853943.
- Rosiah, E., Poernomo, S.H, & Hasan, O. S. 2018." Analisis Penyuluhan Perikanan Partisipatif dan Kompetensi Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sumedang". *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 12(1), 47-63.

- Sudrajat, C. 2021. "Strategi Produktivitas Penyuluhan Perikanan Pada Masa Pandemi". *Jurnal Analisis Kebijakan* 5(1) : 100-106.
- Sugiharto, E., Purnamasari, E., & Rini, A. J. S. 2019. "Efektifitas penerapan metode penyuluhan perikanan terhadap sikap anggota Pokdakan "Senyum Terpadu" di Kelurahan Makroman, Kota Samarinda". In PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH (Vol. 4, No. 3, pp. 471-476).
- Sukardi. 2021. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Supriatna, A., Denok, S., & Rita, I.P., 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Litnus.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah